

SKRIPSI

**PERAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYERAP
ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**KOSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTARSI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYERAP
ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Disusun dan diajukan Oleh :

Muhamad Arif Hidayat

Nim : 218110125

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah Diperiksa Dan Diajukan Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi

Mataram, 04 Agustus 2022


Menyetujui,

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801


M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.AP
NIDN. 0809039203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Ralfmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN. 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYERAP
ASPIRASI MASYARAKAT DIKABUPATEN MANGGARAI BARAT

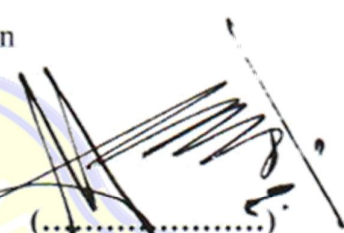
Oleh :

MUHAMAD ARIF HIDAYAT

Nim : 218110125

Telah Dipertahankan Didepan Penguji
Pada Tanggal 04 Agustus 2022
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si** (PU) 
NIDN. 0806066801
2. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.AP** (PP) 
NIDN. 0809039203
3. **Avatullah Hadi, S.IP., M.IP** (PN) 
NIDN. 0816057902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini ini saya mahasiswa Program Sudi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poltik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : Muhamad Arif Hidayat

Nim : 218110125

Alamat : Desa Mata Wae Kec. Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memang benar skripsi yang berjudul “Peran Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat” adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain yang telah dipublikasikan, memang dicari sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya termasuk meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 04 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Arif Hidayat

Nim. 218110125



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Arif Hidayat
NIM : 210110125
Tempat/Tgl Lahir : Mbali, 27 Agustus 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 085.237.015.240
Email : arifhidayat3605@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Fraksi Partai Gerakan Karya (GOLKAR) Dengan Perwakilan
Masyarakat Daerah (OPAD) Dalam Mengrealisasikan Aspirasi Masyarakat
Di Kabupaten Manggarai Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 September 2022
Penulis


Muhamad Arif Hidayat
NIM. 210110125



Mengetahui,
Kepala UPT Perustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
 Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp:(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpus@lib.ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Arit Hidayat
 NIM : 210110125
 Tempat/Tgl Lahir : Mbala, 27 Agustus 1995
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 No. Hp/Email : AritHidayat3605@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Pesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengahli-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Jawa Perwakiln
 Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mengenal Aspirasi Masyarakat
 Di Kabupaten Manggarai Barat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 05 September 2022
 Penulis



Muhamad Arit Hidayat
 NIM. 210110125

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO

“Berlomba Lomba Dalam Kebaikan”



LEMBAR PERSEMBAHAN

**Karya ilmiah ini ku persembahkan kepada
pama, mama tercintah, ke empat saudara dan saudari saya,
keluarga besar batu mbala dan batu capi, teman - teman seperjuangan
dikota mataram, Organisasi IMM kota mataram, Paguyuban FK2M,
Paguyuban IPM2S**



KATA PENGATAR

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DIKABUPATEN MANGGARAI BARAT”** dapat tersusun dengan baik, dapat disajikan dengan baik saya menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pengkajian masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun yang saya sangat harapkan, demi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, dan akhirnya mudahan-mudahan skripsi ini walaupun sederhana dapat bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar. Dalam menyusun skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak terkait tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Ayahanda Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ayahanda Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen pembimbing I Skripsi
3. Bapak Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.AP. Selaku dosen pembimbing II Skripsi

4. Bapak Rahmat Hidayat, S. AP, M. AP. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak M. Aprian Jaelani, S. AP, M.AP. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Orang Tua Tercinta, yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kasih sayang tidak ada batasnya agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Kelas D Administrasi Publik yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, yang selalu memberi semangat, membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini saya sampaikan sebagai bahan referensi dan acuan kedepannya. Sebagai kata penutup “ambil buahnya dan campakkanlah isinya, ambil baiknya dan buanglah buruknya”, TERIMA KASIH.

Mataram, 04 Agustus 2022

Penyusun

Muhamad Arif Hidayat

SKRIPSI

PERAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ABSTRAK

Pembimbing I Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, Pembimbing II M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.I.P, Penulis Muhamad Arif Hidayat

Fraksi dibentuk oleh partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan lainnya. dari latar belakang peneliti mengambil judul Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat. dengan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat, Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan tehnik pengumpulan data, observasi, wawancara dan triangulasi data. adapun hasil pembahasan menjelaskan bahwasanya Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat sudah cukup maksimal, mulai dari menentukan dan mengatur segala urusan fraksi, meningkatkan kemampuan disiplin, daya guna dan hasil guna anggota DPRD dalam melakukan tugas dalam setiap kegiatan, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kemudian indikator penilaian kinerja dari anggota DPRD Fraksi Partai Golkar dari segi kualitas, kerja sama dan inisiatif sudah cukup maksimal. jika dilihat dari Faktor-Faktor Penghambat Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat masih kurangnya kedisiplinan atau ketetapan waktu, seringkali anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar melalaikan waktu yang sudah ditetapkan dalam Aturan Tata Tertip DPRD Kabupaten Manggarai Barat No 1 Tahun 2019 dan juga inisiatif atau kepekaan anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar dalam melihat kondisi ataupun situasi yang ada di tengah masyarakat dalam program kerja yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Manggarai Barat secara umum memberikan manfaat yang baik kepada anggota dewan dalam meningkatkan kinerja mereka melalui bantuan fraksi dan dari faktor penghambat harus segera di atasi agar ditingkatkan kedisiplinan atau ketetapan waktu dan inisiatif dari Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar untuk mendukung kinerja DPRD lebih maju dan bermanfaat.

Kata Kunci : Peran, Fraksi Golkar Dan Kinerja DPRD

**THE ROLE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE
COUNCIL (DPRD) FROM GOLKAR'S PARTY FRACTION IN
ABSORBING THE PEOPLE'S ASPIRATIONS
IN WEST MANGGARAI DISTRICT**

Muhammad Arif Hidayat¹, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si², M. Ulfatul Akbar Jafar,
S.AP.,M.AP³

ABSTRACT

Political parties create factions to enhance the execution of various tasks, among others. The role of the Golkar of the Regional People's Representative Council (DPRD) in absorbing the ambitions of the people in West Manggarai Regency was the title the researcher chose based on the backdrop. How effective is the Golkar faction in the Regional People's Representative Council at absorbing the aspirations of the people in West Manggarai Regency? What are the obstacles standing in the way of the Golkar faction's effectiveness in absorbing the aspirations of the people in West Manggarai Regency? This study employs a qualitative descriptive research methodology that makes use of observations, interviews, and data triangulation to gather information. Regarding the outcomes of the discussion, it was clarified that the Golkar Party faction in the Regional People's Representative Council played a quite maximal role in absorbing the aspirations of the people in West Manggarai Regency, beginning with determining and regulating all factional affairs and enhancing the ability of discipline, efficiency, and effectiveness. The Golkar Party faction DPRD members' performance appraisal indicators in terms of quality, cooperation, and initiative are quite high when they are carrying out their duties in each activity. However, there are still a number of factors that prevent the Golkar Faction Regional House of Representatives from effectively absorbing the aspirations of the people in West Manggarai Regency. The deadlines specified in The Rules of Procedure of the DPRD of West Manggarai Regency No. 1 of 2019 and the initiative or sensitivity of DPRD members from the Golkar Party faction in recognizing the conditions or situations that exist in the community in the work program that will be carried out within a certain period of time are frequently neglected by DPRD members from the Golkar faction. Based on the study's findings, it was determined that the Golkar Party faction's participation in the Regional People's Representative Council in West Manggarai Regency generally offered council members good benefits for enhancing their performance through faction support and from the factors that must be immediately addressed to ensure improved discipline or timing and initiative from Golkar Party faction members of the DPRD to support.

Keywords: Role, Golkar Faction and DPRD Performance



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Pengertian Peran.....	13

2.2.2 Pengertian Kinerja.....	15
2.2.3 Pengertian Partai Politik.....	17
2.2.3.1 Tujuan Partai Politik.....	18
2.2.3.2 Fungsi Partai Politik.....	20
2.2.3.3 Klasifikasi Partai Politik.....	20
2.2.3.4 Ciri-Ciri Partai Politik.....	21
2.2.4 Pengertian Fraksi.....	22
2.2.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	26
2.2.5.1 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	28
2.2.6 Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	31
3.4 Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN HDAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Fraksi Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat.....	37
4.1.2 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Priode Tahun 2019-2024.....	40
4.1.3 Visi Dan Misi Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manggarai Barat ..	42

4.1.4 Struktur Organisasi Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manggarai Barat	43
4.1.5 Jabatan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dalam Alat Kelengkapan Dewan.....	44
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.2.1 Peran Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat	45
4.2.2 Faktor Penghambat Peran Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat ...	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1	Jabatan Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Manggarai Barat Dalam Alat kelengkapan Dewan.....	44
Tabel 4.2	Pengaduan Aspirasi Masyarakat Tahun 2019-2022 Fraksi Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat.....	51
Tabel 4.3	Status penanganan pengaduan masyarakat Tahun 2019 -2022 Fraksi Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manggarai Barat	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang dimana negara ini mengadopsi konsep Trias Politika atau disebut pembagian kekuasaan yang diantaranya Lembaga Legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD), Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden Kementrian) dan Yudikatif (Mahkama Agung dan Mahkama Konstitusi). Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan konsep Trias Politika. Konsep ini dalam kehidupan berpolitik, merupakan cara-cara untuk berpolitik secara demokrasi dengan harapan jalanya pemerintah negara tidak menyimpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balences* (saling mengkoreksi dan saling menyeimbangi). (Nugroho 2014:66)

Menurut Asshiddiqie (Nugroho 2014:67-68) adalah memilih Demokrasi (kedaulatan rakyat) dan Nomokrasi (Supremi Hukum) sebagai pilihan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dengan diberlakunya prinsip pemisahan kekuasaan negara. Dengan demikian, tata kenegaraan kita, termasuk tata parlemen kita, di cita-citakan untuk menuju fase indonesia Demokratis dimana kebebasan, persamaan, perlindungan hak sipil, partisipasi, dan terutama keadilan sosial menjadi nilai-nilai dasar dalam mengelolah Bangsa dan Negara

Di dalam konsep Trias Politika atau pembagian kekuasaan yang dimana salah satunya adalah Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah suatu badan atau dewan yang memiliki wewenang dan kemauan untuk membuat atau membahas UUD yang ada di setiap negara. Lembaga legislatif merupakan salah satu jenis pembuat undang-undang yang diakui jika dibentuk oleh MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota yang mana fungsinya dalam Pasal 77 UU Nomor 22 tahun 2003, pasal 41 UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi: DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; c) pengawasan. Dalam penjelasan lebih panjang disebutkan bahwa: Huruf a fungsi legislasi adalah DPRD Kabupaten/Kota dan legislasi daerah. yang menjadi fungsi DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi secara bersama-sama Gubernur, Bupati/Walikota. Huruf b Yang dimaksud dengan fungsi anggaran merupakan fungsi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang meliputi anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi, kabupaten/kota. Huruf c, Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan tentang pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota dan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan fungsi legislasi, dimana DPRD

provinsi, kabupaten kota membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota. Tentu saja, DPRD untuk menduduki kursi dewan perwakilan harus melalui kontestasi demokrasi atau pemilihan umum di mana calon anggota harus memiliki partai sebagai jembatan untuk menduduki kursi DPRD. Seperti yang dijelaskan oleh Neuman (Margaretha 2018) Partai politik adalah organisasi yang bersaing dengan organisasi lain, partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan kesempatan untuk menggerakkan orang untuk bertindak, dan memiliki fungsi mengelola kehendak umum, mendidik warga negara yang bertanggung jawab, menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. rakyat dan memilih pemimpin.

Budiardjo (Saleh 2008:70) partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya berbagi orientasi, nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan perebutan posisi politik (biasanya), dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Salah satu tugas partai politik yang cukup penting adalah menyerap aspirasi masyarakat. Ini termasuk masyarakat luas dan konstituen partai. Pelaksanaan tugas ini seringkali menjadi sorotan publik atas nilai kerja partai politik. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Karena masyarakat sebagai kelompok kecil tidak akan bisa menyuarkan tuntutan mereka kepada pemerintah secara langsung dengan proses berbelit-belit yang harus ditempuh meski masyarakat harus bisa mengontrol suaranya terhadap agenda setting di parlemen. Fungsi advokasi ini juga sangat penting keberadaannya sebagai penyeimbang bagi pemerintah. Kerja

pemerintah tidak akan terkontrol, penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang tidak tepat sasaran akan terjadi di berbagai tempat ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan implementasi kebijakan. Demikian pula pentingnya peran advokasi bagi partai politik adalah untuk memperkuat pengaruh dan loyalitas massa konstituen partai. Semakin banyak suara rakyat yang tersalurkan, semakin baik loyalitas masyarakat terhadap partai politik.

Sementara itu di Parlemen, para Dewan didalam tubuhnya terbagi kedalam Fraksi dan Komisi, Fraksi dan Komisi memiliki fungsi dan tugas yang berbeda tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama yaitu bagaimana memperbaiki kinerja atau memberikan kinerja yang baik terhadap lembaga. tentu hal ini juga tugas dari fraksi partai Golkar di Manggarai Barat sama dengan tugas Fraksi Partai lainnya. Dimana Fraksi merupakan wakil Partai Politik di DPR dan juga berlaku untuk dewan perwakilan. Untuk mengorganisir partai-partai parlemen, fraksi digunakan sebagai wadah untuk memperoleh dukungan di bidang keuangan dan perorangan bagi partai, anggota parlemen dan bergabung dengan komisi-komisi dewan perwakilan. disiplin yang diterapkan oleh partai politik dengan menggunakan fraksi sebagai alat kontrol dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. (Pratama 2019:1-2). Meski Fraksi itu bukan alat DPR yang memiliki deskripsi tugas tertentu, sebenarnya faksi memiliki peran penting. Sebab, Fraksi DPR kemungkinan tidak akan terpengaruh selama proses tersebut. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), juga dikenal sebagai interplasi, menyatakan pendapat, angket, dan juga ada keterlibatan fraksi dalam setiap

pengambilan keputusan. Fraksi, Kepentingan Partai politik dan Aspirasi Masyarakat Umum dan Konstituen Partai politik di Salurkan oleh Para Anggota Dewan Harus Bekerja Secara Serius dalam Mewakili Rakyatnya.

keberadaan fraksi selain berfungsi sebagai wakil partai politik di DPRD, juga berfungsi sebagai komponen terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan dengan menjalankan fungsi legislasi bagi rakyat banyak. Fraksi harus menjaga kondisi kerja yang baik agar pekerjaan yang dilakukan harus bermanfaat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, fraksi juga harus digariskan secara tepat agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya. Jumlah kewenangan Fraksi sepenuhnya diberikan oleh Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), disebutkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat bahwa tujuan dibentuknya Fraksi adalah untuk mengoptimalkan dan Mengingat hal di atas, tidak dapat disangkal bahwa partai politik juga memiliki andil yang signifikan ketika ia datang untuk memajukan proses demokratisasi di negara tertentu. Mulailah dengan belajar tentang Partai Golongan Karya (GOLKAR). Selain itu, tujuan partai ini adalah untuk berkomunikasi, mempertahankan, mempertahankan, dan mewujudkan keutuhan suatu Negara Republik Indonesia serta mewujudkan cita-cita NKRI. (Yuswanto.2016:2-4)

Berdasarkan observasi awal baik secara langsung maupun tidak langsung peneliti langsung menemukan Dalam mengelola pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di daerah yang tidak selalu optimal untuk tujuan atau operasinya,

situasi ini tidak sesuai dengan harapan sebagaimana disebutkan di atas, dan Secara teoritis, Fraksi dapat berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk membahas masalah yang mempengaruhi masyarakat umum. Karena setiap jenis undang-undang dan keputusan, Kantor Fraksi berfungsi sebagai kantor pengacara, dengan orang-orang yang datang ke ruang Fraksi untuk mengajukan pertanyaan, terutama tentang keadilan dan hal-hal lain yang memerlukan klarifikasi dan untuk membahas keadilan dan lain-lain. Fakta bahwa hal ini belum menjadi inti tradisi Fraksi Partai Golkar juga ditunjukkan oleh fakta bahwa sementara beberapa anggota masyarakat kadang-kadang mengungkapkan aspirasi mereka untuk organisasi atau mengingatkan DPRD tentang masalah di dalam fraksi, DPRD sering absen. dari ruang rapat fraksi. Karena itu, aspirasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap tinggi. Akibat kurang memadainya upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan DPRD di Fraksi Partai Golkar tersebut di atas, sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui tujuan, tugas, atau fungsi lain dari organisasi tersebut.

Dari latar belakang diatas menunjukan peran fraksi partai belum sepenuhnya mampu berperan secara penuh dalam menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas dengan judul **PERAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DALAM Mendukung KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat ?
2. Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Penghambat Peran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki yang ingin di capai oleh peneliti, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Peran Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi penulis

Persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (SI) Administrasi Publik

- b. Manfaat terhadap masyarakat

Pengetahuan tentang peran Fraksi Partai Golkar dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat

c. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharap sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti melakukan kegiatan penelusuran yang meliputi pengumpulan dan pengkajian beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar perbandingan serta mencari temuan kunci terpenting dari penelitian terkait. Penelitian-Penelitian yang dimaksud antara lain :

Pertama, Junita dewi pratama (2019), berjudul “Peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi Sumatra Utara” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD sudah cukup maksimal mulai dari menentukan dan mengatur segala urusan fraksi, meningkatkan kemampuan, disiplin, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga kualitas, kuantitas kerja, dan lainnya sudah dapat dikatakan sangat baik tetapi Jika dilihat dari faktor penghambat masih kurang disiplin waktu dan sering melalaikan, mengulur waktu itu yang menjadi faktor penghambat selama ini dan terus terjadi sampai sekarang. Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang peran fraksi partai dalam mendukung kinerja dewan

perwakilan rakyat daerah (DPRD). Akan tetapi juga Terdapat Perbedaan Penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan fraksi partai yang diteliti.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Candra Avianto (2011) yang berjudul “*Kinerja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta dilihat melalui keterlaksanaan program kerja. sebagai output dari sesuatu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam rapat kerja (Raker) sebelumnya, fraksi PKS memiliki enam program kerja sebagai berikut a) forum diskusi intensif dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang. b) mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis. c) serap aspirasi masyarakat. d) melakukan advokasi kepada masyarakat e) silaturahmi toko masyarakat dan insan media. f) aktif membangun opini. Dari enam proker tersebut poin nomor lima (e) yang masih belum mampu memenuhi target kualitatif kemunculan di radio dan sembilan kemunculan di televisi dari masing-masing 12 kemunculan. Terdapat persamaan penelitian ini persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, masalah tentang fraksi partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terdapat Perbedaan Penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan fraksi partai yang diteliti.

Ketiga, Kusliatun (2014). Berjudul “*Peran fraksi partai kebangkitan bangsa di DPRD Kabupaten Sumenap Priode 2009-2014*”. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang dilakukan FKB DPRD sumenep merupakan salah satu bentuk peran yang mengedepankan kepentingan rakyat, dengan analisa fiqih siyasah hubungannya dengan fiqih siyasah sebagai asas dan prinsip perjuangannya PKB dalam persoalan ini adalah terletak pada sikap *Maslahat* terhadap masyarakat atau kepentingan umum dan 'Adl' (adil). Selain itu bahwa pada dasarnya negara diciptakan adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan negara adalah melindungi, mengayomi, memfasilitasi, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyat. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fraksi partai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai tehknik pengumpulan data. Perbedaan Penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan fraksi partai yang diteliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1.	Penulis dan Tahun	Junita dewi pratama (2019)
	Judul	<i>Peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi Sumatra Utara</i>
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD sudah cukup maksimal mulai dari menentukan dan mengatur segala urusan fraksi, meningkatkan kemampuan, disiplin, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga kualitas, kuantitas kerja, dan lainnya sudah dapat dikatakan sangat baik tetapi Jika dilihat dari faktor penghambat masih kurang disiplin waktu dan sering melalaikan, mengulur waktu itu yang menjadi faktor penghambat selama ini dan terus terjadi sampai sekarang.
	Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan

		penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang peran fraksi partai dalam mendukung kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)
	Perbedaan	Perbedaan Penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan fraksi partai yang di teliti
2.	Penulis dan Tahun	Candra Avianto (2011)
	Judul	<i>Kinerja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta</i>
	Metode penelitian	Kualitatif
	Hasil	pelaksanaan kinerja Fraksi PKS DPRD kota surakarta dilihat melalui keterlaksanaan program kerja. Sebagai output dari sesuatu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam rapat kerja (Raker) sebelumnya, fraksi PKS memiliki enam program kerja sebagai berikut a). forum diskusi intensif dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang. b) mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis. c) serap aspirasi masyarakat. d) melakukan advokasi kepada masyarakat e) silaturahmi toko masyarakat dan insan media. f) aktif membangun opini. Dari enam proker tersebut poin nomor lima (e) yang masih belum mampu memenuhi target kualitatif kemunculan di radio dan sembilan kemunculan di televisi dari masing-masing 12 kemunculan
	Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang sama, masalah tentang fraksi dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini Perbedaan Penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan fraksi partai yang di teliti.
3.	Penulis dan Tahun	Kusliatun (2014)
	Judul	<i>Peran fraksi partai kebangkitan bangsa di DPRD Kabupaten Sumenap Priode 2009-0014</i>
	Metode penelitian	Kualitatif
	Hasil	bahwa apa yang dilakukan FKB DPRD sumenep merupakan salah satu bentuk peran yang mengedepankan kepentingan rakyat, dengan analisa fiqih siyasah hubungannya dengan fiqih siyasah sebagai asas dan prinsip perjuangannya PKB dalam persoalan ini adalah terletak pada sikap <i>Maslahat</i> terhadap masyarakat atau

		kepentingan umum dan 'Adl' (adil). Selain itu bahwa pada dasarnya negara diciptakan adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan negara adalah melindungi, mengayomi, memfasilitasi, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyat.
	Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fraksi partai, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai tehknik pengumpulan data
	Perbedaan	Perbedaan Penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan fraksi partai yang di teliti.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Peran

Peran adalah perilaku atau institusi yang memiliki arti penting bagi struktur sosial. Dalam hal ini, kata peran lebih mengacu pada penyesuaian terhadap proses.

Menurut soeharto (yati 2019), peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) sesuatu. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dari beberapa pernyataan mengenai peran di atas, tergambar bahwa peran menyangkut pelaksanaan tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk mengambil inisiatif dalam tugas dan fungsinya. Peran Memiliki dari beberapa pernyataan mengenai peran di atas Digambarkan bahwa peran melibatkan pelaksanaan suatu tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk mengambil inisiatif dalam tugas dan fungsinya.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa:

- a. Peran/pekerjaan adalah gagasan tentang apa yang orang lakukan di mata sebagai asosiasi, b. peran/pekerjaan menggabungkan standar yang dikomunikasikan oleh posisi atau tempat individu di mata publik, c. peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu d. Menurut pernyataan di atas, seseorang yang bekerja untuk suatu organisasi dapat digambarkan sebagai perilaku atau perilaku jika melanggar standar yang dikomunikasikan kepada masyarakat umum. Poin lain yang dikemukakan dalam sebuah buku ilmu sosial adalah bahwa “peran/pekerjaan adalah perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari mereka yang memiliki status yang Anda lakukan”.

Menurut Friedman (Yati 2019) Peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada setiap orang sesuai dengan posisi sosial yang ditawarkan, baik dalam suasana formal maupun informal. Peran didasarkan pada garis besar (ketentuan) dan mencakup pedoman tentang apa yang harus dilakukan setiap individu dalam situasi tertentu.

Situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan. Harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Menurut Friedman struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Peran formal (peran yang nampak jelas) yaitu Bahasa formal (peran yang tampak jelas) terdiri dari beberapa penutur yang homogen. Peran formal yang biasanya ditemukan dalam keluarga dan yang mendukung posisi sosial seperti suami-ayah dan istri-ibu adalah peran penyedia, pengatur

rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi bayi, rekreasi, persaudaraan (memelihara hubungan keluarga ayah dan ibu), dan terapis seks.

- 2) Peran informal (peran tertutup) yaitu setiap peran yang secara substantif tersirat. Salah satu peran yang diklasifikasikan sebagai implisit (emisional) biasanya tidak memiliki kepermukaan dan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan emisional individu dan untuk meningkatkan kohesi sosial. Sebaliknya, peran-peran informal memiliki kesamaan yang tidak terlalu kaku dan justru didasarkan pada atribut-atribut anggota keluarga tertentu.

2.2.2 Pengertian Kinerja

M. Abdullah (2014: 4) kinerja peran tertentu yang menunjukkan pelaksanaan kinerja terkait pekerjaan yang efektif yang dihasilkan oleh lembaga tertentu yang oleh pimpinan dengan karyawan/SDM yang bekerja di institusi baik pemerintah maupun perusahaan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Moehariono (2012: 95), kinerja adalah jenis pekerjaan, baik. Kinerja adalah sebuah konsep yang mengacu pada ambang batas di mana program, proyek, atau kegiatan tertentu dapat diselesaikan sambil menjunjung tinggi misi, tujuan, sasaran, dan nilai organisasi. Istilah Kinerja berasal dari istilah "kinerja" atau "kinerja nyata" (kinerja atau prestasi nyata) yang mengacu pada semua kegiatan di dalam suatu organisasi kerja tertentu.

Menurut Wirawan (2015:55), indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.

2. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang di hasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkay aktivitas diselesaikannya pekerjaan dalam waktu tertentu yang sudah diterapkan sebagai standar pencapaian waktu penyelesaian pekerjaan dilihat dari sudut koordinasi dengan output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Kerja sama

Pegawai mampu bekrja sama denga sesame rekan kerjanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasi atau instansi.

5. Inisiatif

Pegawai mempunyai kemampuan dalam mengerjakan tugas dan mempunyai inisiatif

6. Komitmen kerja

Komitmen merupakan sebagai suatu keadaan dimana seseorang

individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi menurut Mangkunegara adalah sebagai berikut:

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi
3. Memiliki tujuan yang realitas
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.
5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilkukannya.
6. Mencari kesempatan untuk merealisasi rencana yang telah diprogramkan.

2.2.2 Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik sangat beragam yang dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandang mana para ahli melihat partai politik. Namun, semuanya merujuk pada makna bahwa partai politik adalah organisasi atau tempat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2000: 160), bahwa: “Pada umumnya partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.

Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka”. Definisi partai politik di atas pengertiannya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh R.H. Soltau (Budiardjo 2000:161), yang mengemukakan partai politik adalah sebagai berikut : “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” .

Dari pendapat ahli tersebut, tampak bahwa partai politik dapat menjadi alat dan sarana untuk mendapatkan kekuasaan di parlemen atau pemerintahan dengan cara menarik simpati rakyat untuk memilih partai tersebut agar memenangkan pemilu. Semakin banyak simpati dan dukungan rakyat, semakin besar pula kesempatan partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai. Jika tidak, partai tersebut akan di tinggalkan oleh pendukungnya.

2.2.2.1 Tujuan Partai Politik

Partai politik pengertian yang sangat beragam Setiap organisasi yang didirikan oleh manusia memiliki tujuan tertentu dalam pikirannya. organisasi serupa yang dikenal sebagai Partai Politik. mempertahankan penguasaan kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara, tidak seperti yang dinyatakan pada awalnya, adalah pembentukan suatu Partai politik. demikian juga dapat diamati dari kegiatan yang dilakukan. Rusadi Kantaprawira mencatat bahwa kegiatan Partai Politik seringkali memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti menempatkan rakyat sebagai pejabat pemerintah agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan atau penentuan keputusan atau keluaran politik secara umum.
- b. Upaya untuk melakukan pengawasan, bahkan penentangan jika perlu, terhadap perilaku, tindakan, kebijakan penguasa (terutama dalam situasi di mana mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan).
- c. Berperan untuk dapat mengefektifkan tuntutan yang masih mentah (Raw Opinion), sehingga partai politik berperan sebagai penafsir kepentingan dengan meluncurkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat luas.

Mencermati kegiatan Partai Politik di atas, Seperti dapat dilihat dari uraian di atas, masyarakat secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan alternatif, seperti bergabung dengan partai politik atau menjadi partai politik sendiri. Sehubungan dengan itu, dalam struktur kependudukan yang paternalistik, kemungkinan penduduk untuk bergabung dengan partai politik tertentu seringkali dipengaruhi oleh ideologi atau prinsip-prinsip yang menjadi pedomannya. Karena negara ini adalah negara dengan struktur sosial paternalistik, Partai Politik berkomitmen untuk menegakkan ideologi Partai untuk melindungi hak-hak rakyat dan memajukan posisinya dalam politik global. Penekanan tentang program adalah poin kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat umum. Gaya

hidup dan aktivitas politik Bagian saat ini dapat diklasifikasikan sebagai Parsialisme tradisional.

2.2.2.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik berdasarkan Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 maka dapat diketahui fungsi dari Partai Politik pada pasal 11, partai politik antara lain sebagai Sarana (1) Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Penciptaan Iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur Aspirasi Politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (4) Partisipasi Politik warga Negara Indonesia, dan (5) Rekrutmen Politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

2.2.2.3 Klasifikasi Partai Politik

Menurut Budiardjo (2014:84) Klasifikasi partai politik dapat dilakukan dengan berbagai cara bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaanya secara umum dapat dibagi:

1. Partai Massa

Partai ini mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-

pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama. Kelemahan dari partai ini adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang menjadi anggotanya cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, sehingga persatuan partai menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.

2. Partai Kader

Kekuatan partai ini adalah terletak pada keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjadi kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

2.2.2.4 Ciri-ciri Partai Politik

Menurut Setiadi dan Kolip (Pratama 2019:18) partai politik itu sekedar mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan dan melakukan kegiatan untuk menarik dukungan dari para pemilih dalam pemilihan umum atau cara lain untuk mendapatkan dukungan umum. Maka yang terjadi ciri-ciri partai politik adalah :

1. Berakar dalam masyarakat lokal.
2. Melakukan kegiatan secara terus-menerus.
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam mempertahankan dan.

4. Ikut sebagai konstestan atau peserta dalam pemilihan umum.

Berdasarkan ciri-ciri ini, maka suatu organisasi yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara kontinu, tidak ikut dalam pemilihan umum, dan tidak mempunyai wakil parlemen, tidaklah dapat disebut sebagai partai politik. Sebab dengan memenuhi persyaratan itu, organisasi politik yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan fungsinya untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkannya ke dalam proses pembuatan (lembaga legislatif dan eksekutif).

2.2.3 Pengertian Fraksi

Istilah fraksi merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk *political group/party group* yang ada diparlemen. Istilah lain selain fraksi, juga sering digunakan *faction, clup, group*, dan sebagainya. Dalam pengertian fraksi terkandung maksud adanya “elemen disiplin partai, partai harus dihormati. Anggota-anggota di dalam partai harus menyampaikan hal-hal yang menjadi kebijakan partai, mereka yang tidak mengindahkan kebijakan partai terancam posisinya. Kalau disiplin partai yang akan dipegang maka keberadaan fraksi itu penting.” Di dalam kamus politik yang ditulis oleh B.N marbun bahwa kata fraksi terjemahan sebagai kelompok orang yang mempunyai dan memperjuangkan suatu aliran politik dalam parlemen atau dewan-dewan perwakilan. Juga di terjemahan sebagai bagian kecil; pecahan. Dikenal sejak periode DPR sementara tahun 1950.

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa: Fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.

Sekalipun istilah “aliran” juga dikenal pada masa itu, namun istilah fraksi sudah dimuat pada pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) peraturan tata tertib (Tatib) DPR sementara. Pelaksana representasi suara rakyat dalam prakteknya di Indonesia, dilaksanakan oleh fraksi-fraksi di DPR. Fraksi dipandang sebagai kepanjangan tangan partai politik di tubuh DPR, sementara anggota DPR dipilih melalui partai politik. Menurut tata tertib pasal 1 angka 7 fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. (Iswanto 2013:5).

Fraksi merupakan representatif dari partai politik sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas dan peran sangat menentukan. Fraksi memberikan sikap politik dalam tatanan penggunaan hak bertanya dan menyampaikan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Persoalan penghapusan fraksi dari tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlihat dari keberadaan fraksi di nilai sangat penting karena perpanjangan dari partai politik. Jika fraksi di hapus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka akan terlihat bahwa peran partai politik akan tidak jelas. Kepentingan masyarakat tidak akan tersalurkan melalui fraksi tetapi bila fraksi dihapuskan akan nampak dominasi peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili daerah pemilihan. Adapun tugas dari fraksi, sebagai berikut :

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing.
2. Meningkatkan kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dalam setiap kegiatan.
3. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Warman (2014:2-3) tugas fraksi hanya dalam ruang lingkup internal yang berhubungan dengan keanggotaan partai politik dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas yang sangat penting dalam menjalankan mesin partai. Sementara itu di parlemen, para anggota dewan dikelompokkan dalam fraksi setiap anggota harus menjadi anggota fraksi. Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja anggota legislatif selaku wakil rakyat. Fraksi berfungsi sebagai *think tank* kerja anggota dewan fraksi menjadi wadah konsolidasi, kordinasi dan evaluasi kinerja para anggotanya. Melalui fraksi inilah kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat umum dan konstituen partai politik disalurkan oleh para anggota dewan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu fraksi juga memiliki program kerja dan anggota dewan harus bekerja secara serius dalam mewakili fraksinya dan mewakili rakyatnya.

Fraksi mempunyai peran yang sangat startegis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPRD. Dukungan peran dan kinerja

yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari tahap awal penyaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa resesnya menghasilkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran fraksi.

Keberadaan fraksi selain sebagai perwakilan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat juga menjadi salah satu bagian kecil dari sebuah sistem organisasi pemerintah karena menjalankan fungsi pemerintah di antara legislatif untuk masyarakat. Fraksi harus memiliki kinerja yang baik sehingga pekerjaan yang di laksanakan harus dipastikan membawa manfaat dan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya fraksi juga harus diukur sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pengaturan atau landasan hukum fraksi di DPR di atur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan juga di atur di satu pasal di dalam UU partai politik. Peranan atau fungsi utama dari fraksi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah sebagai fungsi control dari setiap partai politik yang diwakilinya di samping sebagai fungsi pengelompokan dan perwakilan anggota parlemen menurut partai asalnya sebagai penyeragaman pendapat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif itu sendiri.

Sedangkan definisi tentang fraksi tidak dapat di temukan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun dalam prakteknya dapat kita simpulkan bahwa fraksi itu adalah pengelompokan

anggota legislatif dengan latar belakang 1 (satu) partai atau di latarbelakangi dengan kesamaan ide (khusus fraksi gabungan). Sehingga fraksi di anggap sebagai etalase partai politik, dimana bisa dijadikan parameter evaluasi kinerja partai dengan pendapat dan sikap yang dikeluarkan oleh fraksinya yang berada di legislative.

2.2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam teori negara dikenal adanya "*Trias politica*" yang diperkenalkan oleh Montesquie, yakni adanya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan negara yang dikenal yaitu eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Iswara (yati 2020).

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kedudukan yang setara dan merupakan mitra pemerintah. Pengertian rekan dan sederajat diartikan memiliki hak dan kewajiban yang sama tetapi bertentangan dengan pernyataan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

Lembaga ini dikenal sebagai parlemen, karena kata "parle" berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya saat mereka mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen Karena itu, DPR diberi mandat untuk mengkritik pemerintah. setiap wilayah, apakah itu provinsi atau kota atau kota, sebagaimana mestinya. Akibatnya, cabang eksekutif pemerintah memiliki kekuatan untuk membuat keputusan, sedangkan cabang legislatif memiliki kemampuan untuk mengubah undang-undang untuk daerah tanpa badan legislatif. Di tingkat provinsi dan daerah, fungsi-fungsi tersebut

dilakukan oleh pembantu gubernur (warga dulu) dan pembantu bupati (dulu kewedanaan), sedangkan di tingkat nasional dilakukan oleh pembantu kota. Karena itu, selain DPRD, setiap pemilihan umum memiliki tiga tempat pemungutan suara yang harus diisi. Berbagai petunjuk dan persyaratan dari Undang-undang Dasar 1945 bisa saja diterima, yakni.

1. Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota)
2. Hak budget (untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara/daerah)
3. Hak interpretasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif)
4. Hak amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan)
5. Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus)
6. Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang)
7. Hak untuk menyatakan pernyataan pendapat

Sedangkan kewajiban DPR yaitu sebagai berikut :

1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945
2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
3. Memperhatikan aspirasi masyarakat

Kemudian dalam memperlancar tugasnya DPRD mempunyai alat kelengkapan yaitu

1. Pimpinan DPRD
2. Fraksi-fraksi
3. Komisi-komisi

4. Badan musyawarah
5. Badan urusan rumah tangga
6. Badan kerjasama antar parlemen
7. Panitia khusus (pansus)

2.2.4.1 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Ada dua peran utama dari DPRD, pertama badan legislatif adalah badan yang membuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional.

Terdapat pada peraturan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib (Tatip) DPRD kabupaten manggarai barat priode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang membahas tentang fungsi DPRD yang dijelaskan pada pasal 3 yaitu :

- a) Legislasi adalah membentuk Peraturan Daerah Bersama pemerintah Daerah
- b) Anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah Daerah
- c) Pengawasan adalah sebagai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir



Sumber : Wirawan 2015 : 55

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang di tempuh sehubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Menurut Sugiyono (2014:6) menyatakan bahwa metode penelitian dapat di artikan secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian ini dipilih karena dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan pola pola nilai yang dihadapi. Moleong (2000:183).

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna (*prospektif objek*) lebih menonjol dalam penelitian kualitatif. menurut steven dukeshire dan janifer thurlow (2002) metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berkenan dengan data yang bersifat naratif. metode penelitian kualitatif terutama di gunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau

masalah yang akan dipecahkan. metode penelitian kualitatif menggunakan *focus grcus group*, *interview* secara mendalam dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Fraksi Partai Golkar dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi yang berjudul bagaimana *Peran Fraksi Partai Golkar dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Barat*.penulis melakukan penelitian pada kantor DPRD Kabupaten Manggari Barat Kota Labuan Bajo Provinsi NTT.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Cara menentukan narasumber dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purpose sampling*. Yakni salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena sudah mengetahui mengenai lokasi dan objek penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2012:218) dalam penelitian kualitatif terdapat informan, yaitu orang yang dapat memberikan gambaran, pemahaman tentang objek penelitian.

Penelitian memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitang langsung antara lain :

1. Ketua fraksi partai golkar
2. Sekretaris fraksi partai golkar
3. Anggota fraksi partai golkar satu orang
4. Sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (Sekwan DPRD)
5. Ketua partai golkar
6. Pengurus inti partai golkar maksimal dua orang.
7. Tokoh Masyarakat

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015) data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Jadi data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer ke data skunder sebagai pelengkap.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun teknik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Nawawi dalam Sugiyono (2003:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas_lepas.

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, “ *interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* ”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diiteliti, tetapi juga apabila peneliti

ingin mengetahui hal-hal lain dari informan yang lebih mendalam.

Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik dan akan menyusun poin-poin penting atau garis besar pertanyaan yang akan peneliti ajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian. (Gunawan, 2015) dokumen dilakukan dengan mencari data pendukung yang sesuai dengan tema yang diteliti. studi pustaka di gunakan untuk di gunakan untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber keputusan yang relevan.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. dokumentasi ini di ambil untuk memperoleh data-data, foto-foto serta catatan lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo dalam buku Harsono (2008:169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. kesimpulan dalam Temuan baru yang sebelumnya remang-remang atau gelap adalah penelitian kualitatif; setelah jelas, itu bisa berbentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.